



**DAMPAK SOSIAL EKONOMI PENUTUPAN LOKALISASI TERHADAP
MASYARAKAT PUGER TAHUN 2007-2014**

SKRIPSI

Oleh

**ALEX YAYAN S
NIM. 080110301033**

**JURUSAN ILMU SEJARAH
FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS JEMBER**

2015



**DAMPAK SOSIAL EKONOMI PENUTUPAN LOKALISASI TERHADAP
MASYARAKAT PUGER TAHUN 2007-2014**

SKRIPSI

Skripsi diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan studi pada Jurusan Sejarah (S1) dan memperoleh gelar
Sarjana Sastra

Oleh

**ALEX YAYAN S
NIM. 080110301033**

**JURUSAN SEJARAH
FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS JEMBER**

2015

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alex Yayan S

NIM : 080110301033

Menyatakan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Dampak Sosial Ekonomi Penutupan Lokalisasi Terhadap Masyarakat Puger Tahun 2007-2014” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik apabila ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 10 November 2015
Yang menyatakan,

Alex Yayan S
NIM. 080110301033

PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk diujikan oleh:

Dosen Pembimbing

Drs. Parwata, M.Hum.

NIP. 195308011985031002

PERSEMBAHAN

Karya ini sebagai persembahan untuk :

1. Allah SWT.
2. Ayah Suyono dan Ibuku tercinta Wahyu Sri, terima kasih karena telah menjadi orang tua terhebat untukku.
3. Adikku tersayang Citra Pertiwi dan Bekti Prayogo terimakasih telah menjadi motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Kakek Subari (alm), Nenek Soimah beserta keluarga besar yang tidak bias saya sebutkan satupersatu terimakasih atas segala dukungan yang telah diberikan.
5. Untuk almamater tercinta, Universitas Negeri Jember, terima kasih atas kesempatan belajar yang telah disediakan, semoga apa yang diperoleh dapat bermanfaat.
6. Untuk seseorang yang dengan kehadirannya telah mampu mengubah diri ini l ebih berarti, terima kasih atas segala yang yang tidak bisa terungkapkan dengan bahasa apapun.
7. Sahabat, kerabat dan semua orang yang turut serta menjadi bagian dari penyelesaian skripsi ini.

PENGESAHAN

Diterimadan disahkan oleh

Panitia penguji Skripsi Program Strata 1 Jurusan Sejarah Fakultas Sastra
Universitas Jember

Padahari :

Tanggal :

Ketua,

Drs. Parwata, M.Hum.

NIP. 195308011985031002

Anggota 1,

Anggota 2,

Drs. I.G Krisnadi. M.Hum

NIP. 196202281989021001

Drs. Nawiyanto, M.A. Ph.D.

NIP. 196612211992011001

Mengesahkan

DekanFakultas SastraUniversitas Jember,

Dr. Hairus Salikin, M.Ed

NIP. 196310151989021001

MOTTO

*Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan, jangan lihat pula masa depan
dengan ketakutan, tapi lihatlah sekitarmu dengan penuh kesadaran.*

(James Thurder)



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Skripsi ini mengkaji tentang perubahan lingkungan yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo.

Skripsi adalah hasil tugas penyusunan karya ilmiah mandiri oleh mahasiswa di akhir masa studinya. Setelah melakukan beberapa kali diskusi dengan beberapa dosen dan kawan-kawan mahasiswa lainnya, serta melakukan pencarian berbagai macam sumber yang berkaitan, akhirnya penulis menetapkan Dampak Sosial Ekonomi Penutupan Lokalisasi Terhadap Masyarakat Puger Tahun 2007-2014 sebagai judul skripsi. Kerja keras dalam penyusunan skripsi ini ialah untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember.

Proses penyusunan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. Hairus Salikin, M.Ed., Dekan Fakultas Sastra Universitas Jember,
2. Drs. Nawiyanto, M.A., Ph.D., Ketua Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember,
3. Drs. IG Krisnadi, M.Hum., Dosen Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan dan meluangkan waktunya selama ini sebagai Dosen Pembimbing Akademik penulis,
4. Drs. Parwata, M. Hum., Dosen Pembimbing yang telah mengarahkan dengan cermat dan meluangkan waktu, pikiran serta perhatiannya dalam penulisan skripsi ini,
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas sastra khususnya Jurusan Ilmu Sejarah, yang telah memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh kuliah,
6. Seluruh Keluarga Besar BKMS, Terima kasih atas kebersamaanya,
7. Seluruh karyawan dan staf Fakultas Sastra Universitas Jember,

terimakasih atas waktu dan bantuanya, untuk mendukung penulis dalam proses pembuatan skripsi,

8. Seluruh informan dan masyarakat yang telah membantu terwujudnya penulisan ini selama penelitian,
9. Rekan-rekan mahasiswa Sejarah angkatan 2008 yang memberikan bantuan, semangat, motivasi beserta kasih sayangnnya dalam menyelesaikan skripsi ini. Ingat! apa yang kita lakukan saat ini pasti suatu saat akan kita saksikan sebagai sejarah. Semoga semuanya sukses dunia dan diakhirat. Amin.
10. Semua pihak yang telah memberikan dorongan, motivasi, waktu dan kesempatan berdiskusi, menambahkan referensi buku yang sangat membantu dan mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya.

Penulis membuka ruang seluas-luasnya terhadap segala kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca secara umum.

Jember, 10 November 2015

Penulis

DAFTAR SINGKATAN

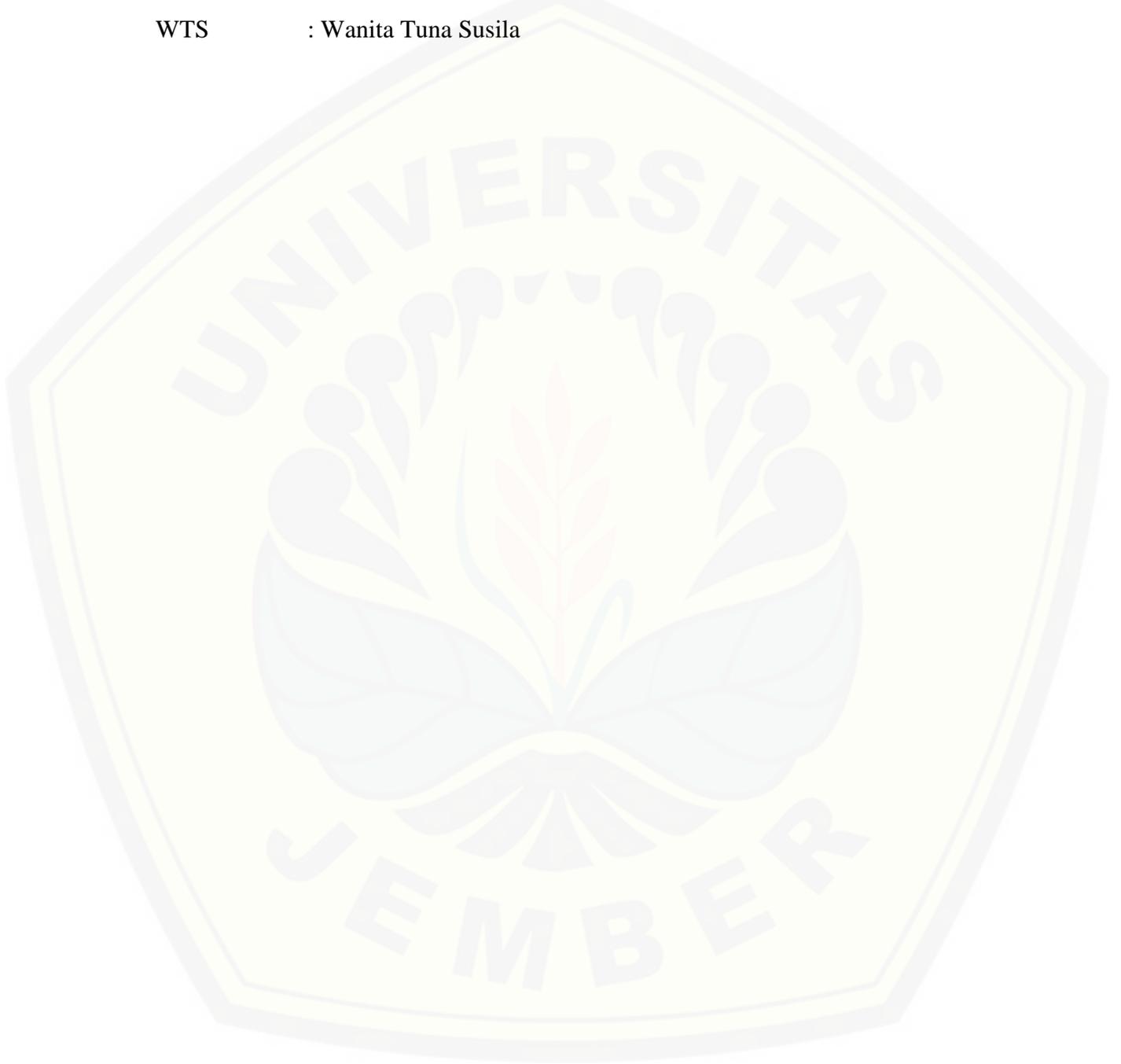
ABG	: Anak Baru Gede
AIDS	: <i>Acquired Immunodeficiency Syndrome</i>
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
DII	: dan lain-lain
HIV	: <i>Human Immunodeficiency Virus</i>
Koramil	: Komando Rayon Militer
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
PDRB	: Product Domestic Regional Bruto
Pemkab	: Pemerintah Kabupaten
PHS	: Penyakit Hubungan Seksual
PMS	: Penyakit Menular Seksual
Pokja	: Kelompok Kerja
Polsek	: Polisi Sektoral
PPI	: Pangkalan Pendaratan Ikan
PSK	: Pekerja Seks Komersial
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RW	: Rukun Warga
Satpol PP	: Satuan Polisi Pamong Praja
SD	: Sekolah Dasar
SK	: Surat Keputusan
SMP	: Sekolah Menengah Pertama

SR : Sambungan Rumah

TPST : Tempat Pelayanan Sosial Transisi

UKM : Usaha Kecil Menengah

WTS : Wanita Tuna Susila



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI	ii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
RINGKASAN	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
1.3.1 Tujuan	12
1.3.2 Manfaat	12
1.4 Ruang Lingkup Kajian	13
1.5 Tinjauan Pustaka	14
1.6 Pendekatan dan Kerangka Teori	16
1.7 Metode Penelitian	17

1.8 Sistematika Penulisan	20
BAB 2. Gambaran Umum Lokalisasi Puger	21
2.1 Gambaran Umum Puger	21
2.1.1 Kondis Geografis	21
2.1.2 Kondisi Demografi	23
2.1.3 Kondisi Sosial Ekonomi	24
2.1.4 Sosial Dan Budaya	24
2.2 Lokalisasi Puger	26
BAB 3. DAMPAK SOSIAL EKONOMI PENUTUPAN LOKALISASI PUGER	27
3.1 Dampak Sosial Penutupan Lokalisasi	27
3.2 Respon Masyarakat terhadap Penutupan Lokalisasi	48
BAB 4. PENUTUP	52
4.1 Kesimpulan	52

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan penutupan lokalisasi Puger. Skripsi ini mencoba mendeskripsikan tentang dampak yang ditimbulkan akibat adanya penutupan lokalisasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah sehingga menghasilkan tulisan yang deskriptif kualitatif. Sumber diperoleh melalui wawancara. Temuan riset menunjukkan bahwa dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan akibat penutupan lokalisasi sangat dirasakan oleh pelaku usaha yang mengantungkan hidupnya di daerah lokalisasi. Pelaku usaha mengeluhkan tingkat pendapatan yang mulai menurun, hal itu dirasakan oleh toko makanan dan minuman, penjaga malam, tukang parkir, tukang cuci hingga tukang ojek. Selain itu dipaparkan beberapa respon masyarakat atas penutupan tersebut. Beberapa yang setuju menilai bahwa penutupan lokalisasi ini dapat membangun etos kerja yang lebih baik dilingkungan masyarakat, meminimalisir demoralisasi pada remaja dan anak-anak. Sementara yang kurang setuju menilai bahwa penutupan lokalisasi hanya menciptakan prostitusi liar dan bisa lebih buruk dari sebelumnya. Dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan dengan penutupan lokalisasi Puger menggambarkan bahwa penutupan lokalisasi memberikan pengalaman yang sangat beragam dilingkungan masyarakat.

Kata Kunci: dampak sosial ekonomi, lokalisasi.

ABSTRACT

This paper discusses the socio-economic impacts caused by the closure of the localization Puger. This thesis tried to describe about the impact caused by the closures localization. The method used in this study is the historical method to produce a qualitative descriptive writing. Source obtained through. Research findings show that the socio-economic impacts caused by the closure of the localization is perceived by businessmen who derive their life in the area of localization. Business operators complained income levels begin to decline, it is perceived by food and beverage stores, night guards, parking attendants, washerwoman to motorcycle taxi drivers. Other than that presented some public response over the closure. Some who disagree considered that the closure of this localization can build a better work ethic within the community, minimizing the demoralization in adolescents and children. While the less agree judge that the closure localization only create wild and prostitution could be worse than before. Socio-economic impacts caused by the closure of the localization Puger portrait that the closure of localization provides a very diverse experience within the community.

Keywords: socio-economic impacts, localization.

RINGKASAN

Prostitusi atau pelacuran merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang tua usianya. Prostitusi bukanlah masalah baru yang ada dalam sebuah masyarakat, tetapi masalah lama yang diwariskan oleh nenek moyang sebagai sebuah budaya. Sebagian masyarakat memandang lokalisasi memiliki bentuk positif yaitu meningkatkan perekonomian/pendapatan, namun prosentasenya kecil. Oleh sebab itu, bagi masyarakat keberadaan lokalisasi tetap dikatakan sebagai tempat yang bermakna negatif sehingga harus ditutup.

Harus disadari bahwa prostitusi terbangun karena logika bisnis, yaitu adanya *supply and demand*, di mana para pelacur membutuhkan uang dan pelanggannya membutuhkan kepuasan seksual. Penutupan lokalisasi Puger berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/39/012/2007 merupakan bentuk atas beberapa kekhawatiran terhadap berbagai persoalan yang dapat diakibatkan oleh lokalisasi. Penutupan lokalisasi mejadi dilema bagi tersendiri sebagian besar pelaku usaha yang turut serta mengambil keuntungan dengan disekitar lokalisasi, selain itu rencana relokasi para pedagang ke tempat lain belum menemukan titik terang sebab pelaku usaha dan masyarakat sekitar terbiasa mengais rejeki didaerah lokalisasi yang padat pengunjung. Sebelum penutupan lokalisasi mereka sangat terangkat ekonominya. Ada banyak kesempatan kerja yang ditawarkan dilokalisasi tersebut bagi masyarakat sekitar, walau dominan masyarakat bermatapencaharian sebagai nelayan namun sampingan bekerja di daerah lokalisasi juga pekerjaan yang basah. Lokalisasi dianggap memberi penghidupan bagi masyarakat sekitar.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena praktek prostitusi di Indonesia, sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari dinamika masyarakat itu sendiri. Masyarakat modern dengan berbagai kompleksitasnya sebagai produk dari kemajuan teknologi dan industrialisasi yang pada akhirnya menyebabkan tumbuh dan berkembangnya praktek-praktek prostitusi di kota-kota besar di Indonesia.

Masalah pelacuran bukanlah menjadi hal yang baru di Indonesia. Pelacuran sendiri merupakan profesi yang sangat tua usianya, setua umur kehidupan manusia itu sendiri. Koentjoro¹ mengatakan bahwa pelacuran di Indonesia sudah terjadi sejak zaman Mojopahit. Fenomena tersebut kemudian berlanjut di dalam kurun waktu antara 1942-1945, pada masa penjajahan Jepang banyak wanita Indonesia yang dijadikan sebagai seorang pelacur yang disebut sebagai Jugun Ian Fu. Fenomena pelacuran tersebut berlangsung hingga saat ini.

Prostitusi di Indonesia, sebagaimana di negara-negara seperti Thailand, Filipina, India, Bangladesh, dsb, menyangkut masalah penghidupan. Penghidupan di sini bukan saja bagi wanita tuna susila (WTS) itu sendiri, melainkan juga bagi mucikari, personal keamanan, bahkan juga anak-anak, keluarga, dan sanak family

¹ Koentjoro. "Prostitusi di Indonesia: Sebuah Analisis Kasus di Jawa" Bandung: *Buletin Psikologi*, Tahun IV, Nomor 2, Desember 1996, Edisi Khusus Ulang Tahun XXXII, 1994, hlm. 340-343.

mereka. Akibatnya, masalah prostitusi menjadi semakin rumit. Muray pernah melakukan dan mendapati hasil bahwa seorang wanita tuna susila dapat membantu hingga 18 sanak familinya²

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Koentjoro mengungkapkan bahwa ada daerah-daerah tertentu yang menjadi “penghasil” pelacur. Banyak hal yang diduga menjadi penyebabnya. Modeling, keinginan akan materi, sikap terhadap perkawinan, dan sikap permisif lingkungan, motif social adalah faktor-faktor yang berpengaruh kuat dalam pembentukan seorang wanita menjadi wanita tuna susila (WTS). Dalam hal tentang jenis pelacur, yang terjadi di Indonesia menunjukkan adanya berbagai macam variasi. Mereka ada yang dapat ditemukan secara terselubung dengan lobi, hingga ada yang terang-terangan, ada yang berpraktek di hari-hari tertentu, hingga setiap hari, ada yang dapat dipilih langsung hingga yang hanya lewat foto.

Membicarakan pelacuran sama artinya dengan membicarakan persoalan klasik tetapi karena kebutuhan untuk menyelesaikannya maka selalu menjadi relevan dengan setiap perkembangan manusia dimana pun. Inilah salah satu doktrin yang ada dalam masyarakat diantara adanya anggapan bahwa prostitusi adalah masalah sosial yang tidak bisa dihilangkan karena ada disetiap zaman dan yang harus dilakukan adalah merelokalisasi prostitusi tersebut sehingga dampak yang ditimbulkan bisa diantisipasi. Sebagian yang lain menilai bahwa prostitusi harus dihilangkan dari permukaan bumi ini, karena prostitusi salah satu penyakit yang dapat merusak moral generasi bangsa yang tentunya berbagai macam cara yang ditawarkan untuk mengatasi hal tersebut. Prostitusi adalah sebuah nama yang diberikan untuk suatu perbuatan yang di dalamnya terlibat beberapa orang dalam suatu kegiatan seksual tanpa memiliki status hubungan pernikahan.

Fenomena prostitusi hingga kini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah, baik upaya preventif maupun upaya yang bersifat represif untuk menanggulangi masalah prostitusi belum menampakkan hasil maksimal hingga kini. Belum adanya satu program terpadu dari pemerintah untuk mengatasi masalah prostitusi

² *Ibid.*, hlm. 45.

menyebabkan fenomena wanita pekerja seks komersial terus tumbuh dengan subur, yang dibuktikan dengan semakin meningkatnya jumlah wanita pekerja seks komersial setiap tahunnya. Praktik prostitusi yang dilakukan secara terang-terangan hingga praktik prostitusi terselubung.

Meningkatnya jumlah PSK merupakan fenomena sosial tersendiri yang harus dicermati bersama serta di carikan alternative penyelesaian oleh semua pihak khususnya pihak pemerintah, karena selain melanggar norma-norma sosial kemasyarakatan, norma agama dan norma hukum, dan keinginan prostitusi atau pelacuran di pandang dari dunia kesehatan merupakan masalah yang sangat berkaitan erat dengan masalah sosial yang akan memicu penyakit menular seksual (PMS) yaitu *Gonorrhoea*, *Sifilis*, *Kandidiasis*, dan sebagainya termasuk infeksi HIV/AIDS.

Walaupun banyak terjadi penolakan sosial terhadap pelacuran di sebagian besar negara Asia, pelacuran masih sangat diperlukan masyarakat dalam fungsinya sebagai kontrol social. Bahkan menurut Bonaparte (dalam Setiawan)³ mengatakan bahwa pelacuran adalah suatu kebutuhan, tanpa pelacuran laki-laki akan menyerang wanita baik-baik di jalanan. Bahkan Coleman and Cressey (dalam Koentjoro)⁴ menekankan aspek positif dari pelacuran dan setuju dengan pernyataan Bonaparte tersebut. Akan tetapi praktek pelacuran juga harus tetap dikontrol karena empat alasan, yaitu (a) ia ”memancing” pria yang tidak tertarik pada pelacuran sebelumnya, (b) ia akan merambah ke daerah yang tidak mengenal pelacuran sebelumnya, (c) penyakit menular akan merajalela, (d) jika rumah bordil ditutup, jumlah pelacur jalanan akan semakin meningkat sehingga masalah lebih lebih rumit.

Seseorang yang memutuskan menjadi pelacur sebenarnya bukan tujuan dalam mencari nafkah, melainkan sebagai salah satu dari upaya untuk mencapai tujuan lain yang lebih utama, karena mereka tidak pernah bercita-cita menjalani

³ Setiawan. “Prostitusi, bisnis atau kejahatan”. Artikel. (online) [http://Pikiran Rakyat.com](http://PikiranRakyat.com). diakses selasa 15 Februari 2015.

⁴ Koentjoro. *Perbedaan Harga Diri Remaja di Daerah Miskin Penghasil Pelacur dan Bukan Penghasil Pelacur. Laporan Penelitian* . (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1999), hlm. 29.

profesi sebagai penjaja seks dan mau menjalani profesinya karena berbagai faktor. Pekerja Seks Komersial (PSK) selama ini selalu diidentikkan dengan seks perempuan, meski pada kenyataannya sekarang ini kaum laki-laki juga mulai merambah profesi ini (gigolo), karena jumlah perempuan PSK yang lebih besar menyebabkan masalah ini selalu dikaitkan dengan perempuan. Terjunnya seorang perempuan ke dalam dunia prostitusi dilatarbelakangi oleh berbagai faktor. Menurut Kartono (dalam Patnani)⁵ faktor utama yang mendorong seseorang berprofesi sebagai PSK adalah faktor keterbatasan ekonomi, sehingga seorang perempuan menerjuni dunia prostitusi untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya.

Mereka yang hidupnya berorientasi pada materi akan menjadikan banyaknya jumlah uang yang dikumpulkan dan kepemilikan sebagai tolak ukur keberhasilan hidup. Banyaknya pekerja seks komersial yang berhasil mengumpulkan banyak materi atau kekayaan akan menjadi model pada orang lain sehingga dapat dengan mudah ditiru. Di sisi lain, seseorang menjadi pekerja seks komersial karena adanya dukungan orangtua atau suami yang menggunakan anak perempuan/istri mereka sebagai sarana untuk mencapai aspirasi mereka akan materi. Jika sebuah lingkungan yang permisif memiliki kontrol yang lemah dalam komunitasnya maka pelacuran akan berkembang di dalam komunitas tersebut. Selain karena alasan di atas, terdapat juga orang yang memilih menjadi pekerja seks komersial karena faktor ekonomi, yang memiliki kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya untuk mempertahankan kelangsungan hidup.

Menurut Hutabarat⁶ dalam penelitiannya menambahkan dua faktor penyebab seseorang menjadi pekerja seks komersial yaitu, faktor pendorong internal dan faktor pendorong eksternal. Faktor pendorong internal berasal dari individu seperti, rasa sakit hati, marah dan kecewa karena dikhianati pasangan, sedangkan faktor pendorong eksternal berasal dari luar individu yaitu tekanan

⁵ M. Patnani, "Prostitusi: Antara Pilihan dan Keterpaksaan". *Jurnal Kognisi*. 1999. Vol. 3. No.2, hlm. 57 – 60.

⁶ D.B. Hutabarat, dkk. *Penyesuaian Diri Perempuan Pekerja Seks dalam Kehidupan Sehari-hari*. (Arkhe, 9, 02, 2004), hlm 70-81.

ekonomi dan ajakan teman yang sudah lebih dahulu menjadi pekerja seks komersial.

Menurut Muecke⁷, ketidakmampuan keluar dari belitan ekonomi menyebabkan pelacuran sama sekali tidak bisa dipersepsi sebagai persoalan moralitas. Menutup atau merelokasi prostitusi apapun, tanpa memecahkan masalah utama, yakni kemiskinan. Dalam uraiannya yang satiris, menyebutkan transaksi seks dalam prostitusi merupakan pilihan rasional para pelakunya untuk melawan kemiskinan.

Menurut Miskawi dan Matali⁸ keberadaan lokalisasi telah memunculkan pekerjaan baru bagi masyarakat setempat yaitu adanya peningkatan ekonomi seperti pedagang, tukang becak, tukang ojek, pembantu atau tukang cuci pakaian, tukang pijat, dan penjual jamu. Sehingga sebagian masyarakat terutama yang mendapatkan manfaat ekonomi dari keberadaan WTS tersebut memiliki persepsi positif terhadap WTS di Lokalisasi. Adanya lokalisasi bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, karena rata – rata keluarga yang bekerja dilokalisasi berasal dari golongan ekonomi rendah.

Sebagian masyarakat memandang lokalisasi memiliki bentuk positif yaitu meningkatkan perekonomian/pendapatan, namun prosentasenya kecil. Oleh sebab itu, bagi masyarakat keberadaan lokalisasi tetap dikatakan sebagai tempat yang bermakna negatif sehingga harus ditutup. Ada satu hal yang belum pernah disadari oleh semua masyarakat yang kontra, bahwa sejarah telah membuktikan sebenarnya prostitusi tidak dapat diberantas dan sulit untuk ditanggulangi atau ditolelir dan akan berdampak negatif lagi jika prostitusi ditekan maka akan mengakibatkan pertumbuhan prostitusi baru. Prostitusi akan semakin marak dan

⁷ Paring Waluyo Utomo. “Menyoal Penutupan Lokalisasi Puger.” (online) <http://www.gusdur.net/diunduh> diakses pada tanggal 18 Mei 2015.

⁸ Miskawi dan Matali. *Peran WTS (Wanita Tuna Susila) Dalam Memenuhi Kebutuhan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Pada Lokalisasi Padang Bulan Di Desa Benelan Kidul Kecamatan Singojuruh Kab. Banyuwangi*. (Bandung: Direktorat jendral pendidikan Tinggi departemen Pendidikan Nasional. 2009), hlm. 6.

berkeliruan seperti yang berada di gang-gang kecil, pemukiman, hotel, pusat keramaian kota yang pada akhirnya berimbas pada ketertibatan dan kesehatan⁹

Pada umumnya pekerja seks komersial rata-rata berasal dari kalangan remaja putri atau sering disebut Anak Baru Gede (ABG) yang menjadi daya tarik tersendiri dalam dunia prostitusi. Hal ini disebabkan karena adanya faktor permintaan sebagai faktor yang menarik dan faktor perantara sebagai faktor yang mendorong¹⁰. Banyaknya permintaan dari konsumen terhadap jasa pelayanan kegiatan seksual yang dilakukan pada remaja putri sehingga semakin banyak pula tingkat penawaran yang ditawarkan. Para perempuan biasanya lebih mudah menjadi pekerja seks komersial karena adanya motif berkuasa, budaya atau kepercayaan seperti hegemoni laki-laki di atas perempuan.

Akibat negatif jauh lebih banyak dari pada positifnya. Akibat negatif yaitu yang menimbulkan dan menyebarluaskan bermacam-macam penyakit kotor dan menular yang sangat berbahaya, yakni penyakit akibat hubungan kelamin atau penyakit hubungan seksual (PHS). Dalam bidang moral, asusila, hukum dan agama, pekerjaan pelacuran termasuk demoralisasi (tidak bermoral), yang bergaul intim dengan mereka juga demoralisasi, karena itu masyarakat memandang rendah martabat PSK. Pelacuran juga dapat menimbulkan kriminalitas dan kecanduan bahan narkotika, karena di tempat-tempat pelacuran biasanya adalah tempat berkumpulnya para penjahat profesional yang berbahaya dan orang-orang yang sedang bermasalah dengan keluarga atau masalah yang lain. Selain di bidang kesehatan dan moral, pelacuran dapat juga mengakibatkan eksploitasi manusia oleh manusia yang lain, karena umumnya wanita-wanita pelacur itu hanya menerima upah sebagian kecil saja dari pendapatan yang harus diterimanya. Akibat yang timbul dari aktivitas pelacuran dapat bersifat negatif maupun positif, namun disisi lain perilaku ini ditolerir demi nilai ekonomi (perbuatan menguntungkan) yaitu dapat terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga dan kebutuhan laki-laki yang menginginkannya. Disamping itu juga prostitusi dilatar

⁹ *Ibid*, hlm. 7.

¹⁰ Koentjoro. *Tutur Dari Sarang Pelacur*, (Yogyakarta : Tinta, 2004), hlm. 62.

belakangi oleh faktor kemiskinan, dimana kemiskinan merupakan suatu keadaan, sering dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan dan kekurangan di berbagai keadaan hidup.

Menurut data dari Komisi Nasional Anak terdapat sekitar 300.000 Pekerja Seks Komersial (PSK) wanita di seluruh Indonesia, sekitar 70.000 diantaranya adalah anak dibawah usia 18 tahun¹¹. Jumlah PSK wanita yang banyak selain menimbulkan masalah sosial juga menimbulkan banyak masalah kesehatan. Masalah kesehatan yang utama terjadi pada PSK adalah penyakit menular seksual (PMS), yaitu penyakit yang penularannya terutama melalui hubungan seksual. PSK wanita dapat menjadi sumber penularan kepada masyarakat melalui laki-laki konsumennya. PMS yang umum terjadi di masyarakat adalah *Gonorrhoea* (16-57,7% dari kasus PMS), kemudian *Non Gonococcal urethritis* (24-54%), *Candidiasis* (23%), *Trichomoniasis*, *Syphilis*, *Condiloma*, *Genital Herpes*¹². yang ditambah adanya data dari Dinas Kesehatan Jawa Timur yang menyebutkan jumlah pengidap HIV tahun 2012 di Jawa Timur sebanyak 14.034 (9.2%) dari seluruh penduduk Jawa Timur yang jumlahnya mencapai 41.437.769 jiwa pada tahun 2012, jumlah tersebut mengalahkan jumlah pengidap HIV yang ada di lokasi yang tersebar di Jawa Timur yaitu sebanyak (7,6%). Dengan jumlah pengidap HIV AIDS tersebut Jawa Timur menduduki peringkat ke-2 setelah DKI yang diikuti Papua, Jawa Barat dan Bali.

Penutupan lokasi Puger berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/39/012/2007 merupakan bentuk atas beberapa kekhawatiran terhadap berbagai persoalan yang dapat diakibatkan oleh lokasi. Penutupan lokasi itu sebagai wujud dari Jember sebagai kota religius, Sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka

¹¹ Anonimous: “penyebaran penyakit infeksi bakteri neisseria gonorrhoeae pada pekerja seks komersial wanita di lokasi puger jember prevalen” (online) www.mysciencework.com diakses pada tanggal 15 Januari 2015.

¹² Hamzah. “Prevalence and incidence of STDs”, (online) :<http://www.reproline.jhu.edu/english/4morerh/4std/stdproc-j.htm> diakses pada tanggal 15 Januari 2015.

Menengah Daerah (RPJMD). Selain alasan panduan RPJMD diatas, Fadhallah¹³ mengajukan alasan lain atas keluarnya SK bupati tersebut, yakni Pemkab Jember hendak memanusiaawikan dan meningkatkan martabat Pekerja Seks Komersial (PSK). Dari data yang ada, lokalisasi PSK yang ada di Kecamatan Puger, Jember jumlah PSK-nya mencapai 169, dengan perincian 111 orang Jember sendiri, 58 sisanya berasal dari luar Jember¹⁴

Banyak kalangan yang menilai penutupan lokalisasi hanya pencapaian program pemda Jember, tanpa mempertimbangkan permasalahan sebenarnya, yakni lapangan pekerjaan yang tidak seimbang dengan angkatan kerja, tidak akan pernah selesai hanya dengan menutup lokalisasi. Bahkan ketidakmampuan dari para wanita harapan (PSK) untuk bersaing mendapatkan pekerjaan yang lebih baik akan menyebabkan kegagalan pencapaian positif dari kebijakan ini. Selain menutup mata pencaharian wanita harapan, pedagang makanan dan pemilik yang berada di daerah maupun di sekitar lokalisasi juga merasakan dampak sehingga harus menutup pula usaha mereka karena sepi pembeli. Pemberian kompensasi dan keahlian tambahan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah Jember dinilai tidak menyelesaikan persoalan ekonomi keluarga mereka. Tak jarang banyak yang yakin mantan PSK ini akan kembali menekuni profesi lamanya dan menjadi tidak terkontrol akibat tidak ada tempat mangkal yang resmi sehingga kejadian HIV/AIDS di masa mendatang jauh lebih banyak. Hal ini dilakukannya karena rasa peduli sekaligus prihatin dengan kehidupan warganya yang berada di daerah lokalisasi tersebut. Pendapat ini berkembang seiring dengan tidak terjaminnya kesehatan terutama dari penularan HIV/AIDS di dalam dan luar daerah lokalisasi, kurangnya pendidikan anak di daerah tersebut, dan perkembangan lokalisasi yang semakin pesat dalam membuka tempat pelacuran baru. Dengan tujuan memasyarakatkan PSK, penutupan lokalisasi akan memberikan banyak sekali manfaat tidak hanya bagi masyarakat Jember secara umum, namun juga para pemain di lokalisasi yang hingga kini menyangsikannya.

¹³ Paring Waluyo Utomo, "Menyoal Penutupan Lokalisasi Puger". (online) <http://www.gusdur.net/diunduh tanggal 18 Mei 2015>.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 20.

Penyelesaian masalah sosial, peningkatan perekonomian masyarakat, penataan kota, hingga penanggulangan dan penurunan masalah kesehatan terutama reproduksi dalam beberapa tahun dapat tercapai apabila kebijakan pemerintah ini terealisasi.

Beberapa hal yang tidak terpenuhi dalam pelaksanaan Keputusan Bupati Jember Nomor 39 Tahun 2004 tersebut sebagaimana dikemukakan oleh salah satu Mucikari di Puger Kulon bahwa : Pelaksanaan pelatihan yang dilakukan oleh kelompok kerja (Pokja) hanya dilakukan selama 5 (lima) kali dalam 3 (tiga) tahun, namun apabila tidak ada pelatihan, kelompok kerja tidak pernah datang lagi ke Puger Kulon, ini artinya Kelompok Kerja tidak konsisten terhadap amanat yang diberikan dalam Keputusan Bupati. Penjagaan dan pengawasan terhadap tata tertib oleh pihak Koramil dan Polsek maupun Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Puger tidak pernah dilakukan baik pada hari biasa maupun pada saat dilaksanakannya pelatihan oleh kelompok kerja, sehingga tata tertib yang dibuat banyak dilanggar dan tidak ada sanksi apapun atas pelanggaran tersebut, salah satunya adalah pelanggaran terhadap jam kunjung tamu¹⁵.

Pelatihan di bidang apapun harus didukung dengan sarana dan prasarana yang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Pelatihan yang diberikan bagi Pekerja Seks Komersial di Puger Kulon juga harus menyediakan hal tersebut, misalnya apabila ada pelatihan menjahit, maka seharusnya diberikan mesin jahit dan disediakan tempat yang representatif. Namun, alat-alat atau sarana prasarana yang dibutuhkan tidak pernah didapatkan oleh Pekerja Seks Komersial. Pelaksanaan pelatihan tersebut dilakukan di balai RW 09 dengan sarana yang sangat terbatas. Praktik di lapangan membuktikan bahwa masih ada sarana yang menggunakan uang dari masyarakat Puger Kulon yaitu memberikan suntikan, menyewa pengeras suara dan beberapa kegiatan lain. Pekerja Seks Komersial yang dibina yaitu Pekerja Seks Komersial yang berada di Puger Kulon sangat antusias dan senang ketika dilakukan sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten

¹⁵ Muclas Adi Putra. "Kontroversi Penutupan Lokalisasi Puger Kulon di Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun 2001-2007." *Jurnal*. (Universitas Jember, 2013).

Jember No.14 Tahun 2001 tentang Penanganan Prostitusi di Kabupaten Jember dan pendataan yang dilakukan oleh Kelompok Kerja. Selain dilakukan pendataan tersebut, mereka juga ditanyai beberapa hal diantaranya mengenai hobi, minat dan bakatnya serta dijanjikan akan dipekerjakan di perusahaan, maupun akan diberikan modal. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember selaku penyedia pos anggaran bagi pelaksanaan Keputusan Bupati Jember No.39 Tahun 2004, ternyata masih sedikit sekali yang dikucurkan sampai di lapangan bahkan ada sarana yang menggunakan uang dari masyarakat Puger Kulon yaitu pemberian suntikan, sewa pengeras suara dan sebagainya.

Namun tidak semua PSK di Puger memilih jalur yang dikehendaki Pemkab. Beberapa diantara mereka tampaknya akan tetap melanjutkan mencari nafkah dengan tetap menjadi PSK. Penutupan lokalisasi Puger oleh Pemkab, ternyata membawa konsekuensi tersendiri, yaitu praktik prostitusi “liar”. Sedangkan Pemkab Jember belum memiliki antisipasi atas dampak penutupan itu. Sementara di kalangan mucikari, berniat akan bertahan di lokalisasi Puger. Walau mereka sadar bahwa tanah yang mereka gunakan untuk penyewaan kamar bagi para PSK itu adalah tanah negara. Alasannya, penempatan lokalisasi di Puger awalnya juga karena kebijakan dari Pemkab Jember¹⁶

Studi kasus yang terjadi di Kabupaten Jember, berdasarkan hasil penelitian Miskawi¹⁷ menunjukkan bahwa akibat adanya penutupan lokalisasi Puger Kabupaten Jember pada bulan Maret 2007 tanpa memberikan solusi (jalan keluar bagi WTS) dan mempertimbangkan sisi-sisi negatifnya. Maka, mengakibatkan pertumbuhan prostitusi baru yang semakin marak dan berkeliaran. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan lebih dari 21 titik tempat mangkal, misalnya di daerah Mayang ada di warung kopi Bu Is, Bu Jatim, Bu Lilik, Bu Dalmi, Stasiun Jember, Hotel Nusantara, Dolog (Pakusari), Rambipuji, Sumpersari, Wuluhan, Tanggul, Pasar Tanjung, Semanggi, Gintangan dan seterusnya. Kondisi obyektif hasil

¹⁶ Paring Waluyo Utomo, “Menyoal Penutupan Lokalisasi Puger”. (online) <http://www.gusdur.net/diundauh tanggal 18 Mei 2015>.

¹⁷ Miskawi, “Menguak WTS (Wanita Tuna Susila) Antara Peran Positif Terabaikan dan Termarginalkan Dalam Bentuk Pembelaannya Tahun 1970-2009.” *Jurnal Ilmiah*. (PROGRESSIF Vol. 6 No.18, 2009).

penelitian tersebut belum pernah dilihat secara bijak oleh masyarakat dan pemerintah. Padahal dengan keberadaan lokalisasi sebagai tempat penampungan dapat memberikan nilai positif dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan dan politik. Akan tetapi, nilai positif keberadaan lokalisasi tidak pernah diperhitungkan atau diteliti oleh lembaga pemerintah daerah dan lembaga penelitian yang ada dibawah naungan universitas.

Penutupan tetap menimbulkan kontroversi, terutama bagi mereka yang memperoleh penghasilan dari kawasan tersebut, seperti para PSK dan mucikari, serta para pedagang, tukang cuci, tukang parkir, tukang ojek, atau tukang becak. Pedagang makanan dan minuman banyak mengantungkan hidup mereka di lokalisasi, kehidupan mereka sangat terangkat secara ekonomi bahkan ada yang sudah mempekerjakan orang lain. Begitu juga dengan pekerjaan yang lain seperti tukang cuci parkir para PSK, ataupun para tukang parkir yang menjaga keamanan kendaraan para pengunjung, tukang ojek yang sering dipake PSK untuk belanja barang. Sebelum penutupan lokalisasi mereka sangat terangkat ekonominya. Ada banyak kesempatan kerja yang ditawarkan dilokalisasi tersebut bagi masyarakat sekitar, walau dominan masyarakat bermatapencaharian sebagai nelayan namun sampingan bekerja di daerah lokalisasi juga pekerjaan yang basah. Lokalisasi dianggap memberi penghidupan bagi masyarakat sekitar. Ketika banyak masyarakat sekitar bergantung hidupnya pada lokalisasi maka sangat jelas dampaknya ketika lokalisasi itu ditutup. Harus disadari bahwa prostitusi terbangun karena logika bisnis, yaitu adanya *supply and demand*, di mana para pelacur membutuhkan uang dan pelanggannya membutuhkan kepuasan seksual¹⁸. Para PSK eks-Puger tetap dapat beroperasi selama masih ada pelanggan yang menginginkan meskipun harus bekerja di luar wilayah Lokalisasi Puger. Prostitusi akan hilang eksistensi jika tidak ada pengunjung yang datang.

¹⁸ Hartini Retnaningsih, "Dampak Sosial Penutupan Lokalisasi Dolly" Vol. VI, No. 13/I/P3DI/Juli/2014 (Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), 2009).

Berdasarkan uraian tersebut maka dipilih judul skripsi Dampak Sosial Ekonomi Penutupan Lokalisasi Puger 2007-2014 dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Lokalisasi Puger memiliki rentetan sejarah yang turut serta memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah dan juga masyarakat sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan lokalisasi memainkan peran penting dalam bidang ekonomi bagi keluarga para WTS dan lingkungan sekitar yang menggantungkan hidupnya diareal lokalisasi. Penutupan lokalisasi jelas akan memberikan dampak terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar lokalisasi Puger.
2. Kedekatan peneliti dengan objek penelitian sehingga diharapkan dapat hasil lebih optimal
3. Pengaplikasian teori yang selama ini diperoleh dibangku kuliah

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti ingin memahami lebih mendalam mengenai dampak yang diakibatkan penutupan lokalisasi Puger dengan judul Dampak Sosial Ekonomi Penutupan Lokalisasi Puger 2007-2014. Dampak sosial ekonomi dapat diartikan sebagai akibat yang ditimbulkan dari adanya penutupan lokalisasi terhadap perekonomian masyarakat sekitar lokalisasi, diantaranya pedagang sekitar lokalisasi, pelaku usaha lainnya seperti tukang ojek, tukang becak, dan sebagainya. Dampak tersebut akan dikaji selama 3 tahun terakhir yaitu pasca penutupan lokalisasi Puger.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang ingin dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah dampak penutupan lokalisasi terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar lokalisasi?
2. Bagaimanakah respon masyarakat terhadap penutupan lokalisasi?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan

Mengacu pada rumusan masalah yang ingin dikaji dalam penelitian ini, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu:

1. Mengetahui dampak penutupan lokalisasi terhadap kondisi social ekonomi masyarakat sekitar lokalisasi
2. Mengetahui respon masyarakat terhadap penutupan lokalisasi

1.3.2 Manfaat

Mengacu pada tujuan penelitian maka kemanfaatan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat meningkatkan pengalaman peneliti dalam bidang penelitian, selain itu dapat meningkatkan pengetahuan peneliti mengenai dampak yang ditimbulkan atas penutupan lokalisasi
2. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan-kebijakan yang memecahkan persoalan dengan tidak menyebabkan persoalan lainnya
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan pemahaman secara objektif mengenai langkah dan upaya pemerintah atas penutupan lokalisasi puger, sehingga diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Prostitusi adalah realitas yang nyata ditengah-tengah kehidupan manusia yang berbudaya dan selalu hadir untuk mewarnai generasi kehidupan setiap bangsa yang ada. Permasalahan ekonomi merupakan aspek yang mendasar dalam melatar belakangi lahirnya kebanyakan perilaku prostitusi sehingga ketergantungan terhadap prostitusi dalam mendapatkan keuntungan, untuk memenuhi kebutuhan hidup telah menyebabkan perilaku tersebut mengakar ditengah-tengah masyarakat.

Prostitusi disadari atau tidak telah memberikan dampak positif maupun negatif bagi masyarakat sekitarnya, sehingga keberadaan prostitusi tersebut dapat membangun dan menghambat pembangunan baik secara fisik maupun secara

mental terhadap sumber daya manusia dan sumber daya alam masyarakat sekitarnya. Adapun ruang lingkup yang peneliti maksudkan dalam mengkaji permasalahan prostitusi yang ada di desa Puger Kulon Kabupaten Jember. Penutupan lokalisasi Puger berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/39/012/2007. Penutupan lokalisasi itu sebagai wujud dari Jember sebagai kota religius, Sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penutupan lokalisasi menjadi permasalahan sendiri bagi masyarakat sekitar lokalisasi yang sebagian besar bergantung pada kegiatan tersebut. Meski penutupan lokalisasi mengundang pro dan kontra oleh sebagian kalangan, namun harus diakui bahwa lokalisasi banyak memberikan dampak positif pada perekonomian daerah dan masyarakat sekitar.

Penutupan lokalisasi hanya akan mempersempit ruang gerak para pekerja seks komersial, bukan menghentikan selamanya. Permasalahan yang dihadapi oleh berbagai PSK menjadi perdebatan yang sulit menemukan titik terang karena berkaitan dengan beberapa pihak terutama pemerintah. Sebab prostitusi merupakan akibat dari salah satunya adalah persoalan ekonomi, tidak satupun yang berharap menjadi PSK. Penelitian ini ingin membahas masalah dampak yang ditimbulkan akibat penutupan lokalisasi terhadap masyarakat lokal ditinjau dalam ruang lingkup sosial ekonomi meliputi kesehatan, pekerjaan, pendapatan, dan pendidikan.

1.5 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dalam penulisan karya sejarah sangat dibutuhkan untuk mengulas atau meninjau bahan-bahan pustaka yang memiliki hubungan pokok materi penelitian. Tujuan dilakukan tinjauan pustaka adalah untuk membuktikan aspek orisinalitas data penelitian yang telah dilakukan. Selain itu tinjauan pustaka berisi uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian terdahulu dan yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Karya yang digunakan sebagai tinjauan pustaka dalam skripsi ini antara lain, *Tutur Dari Sarang Pelacur*

karya Koentjoro¹⁹. Buku ini menjelaskan bahwa sisi lain bahwa faktor penentu yang menjadi seorang pelacur tidak hanya kemiskinan melainkan sosialisasi dan modeling. Selain itu ia juga berusaha mengidentifikasi tentang asal daerah pelacuran yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Ia berkesimpulan bahwa para pelacur itu berasal dari daerah tertentu. Sementara di lokalisasi Puger sebagian PSK paling banyak dari daerah Puger Kulon.

Karya berikutnya adalah *Penyesuaian Diri Perempuan Pekerja Seks dalam Kehidupan Sehari-hari* karya Hutabarat, D.B., dkk²⁰. Tulisan ini menjelaskan bahwa semua mata pelajaran cenderung menutupi pekerjaan mereka untuk menghindari isolasi sosial. Sementara di Lokalisasi Puger lingkungan sekitar jarang masyarakat yang jenjang pendidikannya tinggi.

Karya berikutnya adalah *Prostitusi: Antara Pilihan dan Keterpaksaan*. Karya Patnani²¹. Tulisan ini menjelaskan bahwa pelacuran merupakan akibat dari suatu keadaan yang memungkinkan seseorang tidak memiliki pilihan selain melacurkan diri. Sementara di Lokalisasi Puger sebagian besar PSK sudah bersuami dan suami mengetahui mengenai pekerjaan tersebut.

Selain itu juga terdapat skripsi perbandingan yaitu karya Muclas²², tentang Kontroversi Penutupan Lokalisasi Puger Kulon Di Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun 2001-2007, dalam karya ini menjelaskan bahwa kontroversi penutupan lokalisasi yang berkepanjangan antara pihak yang setuju dan tidak setuju. Beberapa elemen masyarakat yang berkepentingan menutup lokalisasi dengan dalih mengatasi penyakit masyarakat, dengan para PSK (Pekerja Seks Komersil), mucikari, pedagang sekitar lokalisasi, dan golongan masyarakat

¹⁹ Koentjoro. *Tutur Dari Sarang Pelacur*, (Yogyakarta : Tinta, 2004), hlm. 207.

²⁰ D.B. Hutabarat, dkk. "Penyesuaian Diri Perempuan Pekerja Seks dalam Kehidupan Sehari-hari." *Arkhe*, 9, 02, 70-81, 2004.

²¹ M. Patnani, "Prostitusi: Antara Pilihan dan Keterpaksaan. *Jurnal Kognisi*." (VoL. 3. No.2, 1999).

²² Muclas Adi Putra, et. al. "Kontroversi Penutupan Lokalisasi Puger Kulon di Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun 2001-2007." *Artikel*. Universitas Jember: Hasil Penelitian Mahasiswa 2013, I (1): 1-7. 2013.

lain yang tidak setuju dengan hal tersebut, karena menyangkut kehidupan mereka secara langsung. Sementara dalam karya ini merupakan kelanjutan dari dampak yang ditimbulkan dari penutupan lokalisasi bagi daerah sekitar. Terutama kepada pihak yang bersentuhan dengan aktifitas lokalisasi seperti pedanga, tukang ojek dll.

Selain itu juga terdapat skripsi pembanding yaitu karya Ahmad Subur Jailani mengkaji tentang Prostitusi di Jember Tahun 1974-2007, pada karya ini menjelaskan bahwa prostitusi di Jember tidak lagi dilakukan oleh kalangan dewasa saja, bahkan anak yang masih di bawah umur juga ikut serta di dalamnya. Fenomena ayam kampus dan gadis putih abu-abu juga banyak terjadi di Jember. Praktek prostitusi menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat sekitar. Sementara dalam karya ini merupakan kelanjutan dari dampak yang ditimbulkan dari penutupan lokalisasi bagi daerah sekitar. Terutama kepada pihak yang bersentuhan dengan aktifitas lokalisasi seperti pedagang, tukang ojek, dll.

1.6 Pendekatan dan Kerangka Teori

Pandangan bahwa prostitusi merupakan perilaku kotor dan tidak bermoral serta salah satu penyakit sosial adalah fakta yang tidak dapat terbantahkan pula. “Tapi tidak mungkin pula untuk menghapuskan prostitusi adalah juga fakta tidak terbantahkan. Karena itu, penanganan prostitusi tidak dapat dilakukan secara sembarangan dan tidak hanya melihat berdasarkan aspek moral semata. Prostitusi adalah persoalan yang rumit dan terkait aspek sosial, budaya, ekonomi, politik serta moral dan agama. upaya menanggulangi prostitusi hanya dengan pendekatan moral dan agama adalah naif dan tidak akan menyelesaikan masalah itu.

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Sartono, penggunaan pendekatan teoritis dan kerangka konseptual akan mampu memberikan daya jelas yang lebih baik, sehingga sejarah tidak terbatas pada cerita²³. Bagian penting dalam penulisan sejarah adalah penggunaan teori dan metodologi yang tepat dalam menganalisis kejadian sejarah. Kajian ini menggunakan kerangka dampak

²³ Sartono Kartodirjo. *Pendekatan Ilmu Saosial dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta: Gramedia Putaka Tama, 1993), hlm. 4.

yang berarti benturan; 2 pengaruh kuat yg mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif); 3 *Fis* benturan yg cukup hebat antara dua benda sehingga menyebabkan perubahan yg berarti dl momentum (pusa) sistem yg mengalami benturan itu²⁴. Dengan demikian dampak mengandung pengertian bahwa akibat yang ditimbulkan oleh adanya sesuatu.

Penutupan lokalisasi puger memiliki dampak tersendiri bagi para pelaku dan masyarakat baik itu positif ataupun negative. Bagi sebagian masyarakat penutupan lokalisasi merupakan langkah tepat untuk mengurangi adanya penyakit menular atau demoralisasi pada remaja disekitar lingkungan lokalisasi, namun bagi pihak yang mengantungkan hidup disekitar lokalisasi ini menjadi semacam ancaman kehidupannya terutama para pelaku usaha, juru parker, tukang ojek dan took disekitar lokalisasi. Keberadaan lokalisasi ini, menarik masyarakat sekitar untuk mencari “rezeki”, dengan demikian keberadaan lokalisasi memberi peluang masyarakat untuk mencari tambahan pendapatan.

Seiring dengan perkembangan jaman yang menuntut adanya perubahan, maka masyarakat yang menentang berdirinya lokalisasi mencoba untuk menutup lokalisasi, karena dianggap bertentangan dengan norma masyarakat. Aksi-aksi ini mengakibatkan keluarnya intruksi Bupati Jember No. 42 tahun 1998 tentang penutupan lokalisasi pelacuran di Puger. Berlandaskan pada asumsi bahwa penutupan lokalisasi pelacuran secara paksa niscaya akan membawa sejumlah dampak. Penutupan lokalisasi Puger bukan berarti menghentikan kegiatan prostitusi malah penutupan ini dapat mengancam adanya prostitusi liar yang dampaknya bisa semakin parah terhadap terhadap kehidupan social dan ekonomi.

1.7 Metode Penelitian

Adapun menurut Sukardi²⁵ penelitian sejarah adalah salah satu penelitian mengenai pengumpulan dan evaluasi data secara sistematis, berkaitan

²⁴ Sumber Internet: anonimous, definisi dampak, <http://www.artikata.com/arti-324325-dampak.html>.

²⁵ Sukardi. *Metodologi Penelitian Kependidikan*. (Jakarta: Bumi Aksara. 2003), hlm. 203.

dengan kejadian masa lalu untuk menguji hipotesis yang berhubungan dengan faktor-faktor penyebab, pengaruh atau perkembangan kejadian yang mungkin membantu dengan memberikan informasi pada kejadian sekarang dan mengantisipasi kejadian yang akan datang. Kesimpulan yang dapat diambil peneliti dari beberapa pengertian tersebut adalah bahwa metode sejarah merupakan proses penelitian terhadap sumber-sumber masa lampau yang dilakukan secara kritis-analitis dan sistematis dengan akhir kontruksi imajinasi yang disajikan secara tertulis.

Metode penelitian sejarah terdiri atas empat langkah, yaitu : (1) heuristic (pengumpulan data); (2) kritik sumber (kritik eksternal dan kritik internal); (3) interpretasi; dan (4) historiografi²⁶, mengungkapkan beberapa langkah yang harus dilakukan dalam melakukan metode sejarah yaitu:

1. Heuristik (Pengumpulan Data)

Heuristik merupakan langkah awal dalam penelitian sejarah untuk berburu dan mengumpulkan berbagai sumber data yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Misalnya dengan melacak sumber sejarah tersebut dengan meneliti berbagai dokumen, mengunjungi situs sejarah, mewawancarai para saksi sejarah. Sumber penulisan yang digunakan adalah sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer berupa tulisan-tulisan mengenai peristiwa tersebut seperti pedoman wawancara, hasil wawancara dengan pelaku yang terkena dampak penutupan lokalisasi. Guna untuk melengkapi data tersebut digunakan juga data sekunder seperti buku berhubungan dengan prostitusi, jurnal, karya tulis tentang lokalisasi Puger. Tanpa adanya sumber sejarah, maka sejarahan akan mengalami kesulitan dalam menemukan jejak sejarah. Hal ini disebabkan sumber sejarah merupakan bagian penting untuk mengetahui suatu peristiwa sejarah dimana, sejarah itu tidak bisa diulangi lagi karena sejarah hanya terjadi satu kali oleh karena itu untuk mengetahui sejarah diperlukan sumber sejarah.

2. Kritik (Verifikasi)

²⁶ Louis gottshalk. *Mengerti Sejarah*, (Terj.) Nugroho Notosusanto (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1975), hlm.32.

Kritik merupakan kemampuan menilai sumber-sumber sejarah yang telah dicari (ditemukan). Kritik sumber sejarah meliputi kritik ekstern dan kritik intern.

a. Kritik Ekstern

Kritik Ekstern di dalam penelitian ilmu sejarah umumnya menyangkut keaslian atau keautentikan bahan yang digunakan dalam pembuatan sumber sejarah, seperti prasasti, dokumen, dan naskah. Bentuk penelitian yang dapat dilakukan sejarawan, misalnya tentang waktu pembuatan dokumen itu (hari dan tanggal) atau penelitian tentang bahan (materi) pembuatan dokumen itu sendiri. Sejarawan dapat juga melakukan kritik ekstern dengan menyelidiki tinta untuk penulisan dokumen guna menemukan usia dokumen. Sejarawan dapat pula melakukan kritik ekstern dengan mengidentifikasi tulisan tangan, tanda tangan, materai, atau jenis hurufnya.

b. Kritik Intern

Kritik Intern merupakan penilaian keakuratan atau keautentikan terhadap materi sumber sejarah itu sendiri. Dalam proses analisis terhadap suatu dokumen, sejarawan harus selalu memikirkan unsur-unsur yang relevan di dalam dokumen itu sendiri secara menyeluruh. Unsur dalam dokumen dianggap relevan apabila unsur tersebut paling dekat dengan apa yang telah terjadi, sejauh dapat diketahui berdasarkan suatu penyelidikan kritis terhadap sumber-sumber terbaik yang ada.

3. Interpretasi (penafsiran)

Interpretasi adalah menafsirkan fakta sejarah dan merangkai fakta tersebut hingga menjadi satu kesatuan yang harmonis dan masuk akal. Dari berbagai fakta yang ada kemudian perlu disusun agar mempunyai bentuk dan struktur. Fakta yang ada ditafsirkan sehingga ditemukan struktur logisnya berdasarkan fakta yang ada, untuk menghindari suatu penafsiran yang semena-mena akibat pemikiran yang sempit. Bagi sejarawan akademis, interpretasi yang bersifat deskriptif saja belum cukup. Dalam perkembangan terakhir, sejarawan masih dituntut untuk mencari landasan penafsiran yang digunakan.

4. Historiografy (Penulisan Sejarah)

Historiografy adalah proses penyusunan fakta-fakta sejarah dan berbagai sumber yang telah diseleksi dalam sebuah bentuk penulisan sejarah. Setelah melakukan penafsiran terhadap data-data yang ada, sejarawan harus sadar bahwa tulisan itu bukan hanya sekedar untuk kepentingan dirinya, tetapi juga untuk dibaca orang lain. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan struktur dan gaya bahasa penulisannya. Sejarawan harus menyadari dan berusaha agar orang lain dapat mengerti pokok-pokok pemikiran yang diajukan.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran dan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Gambaran Umum Lokalisasi Puger

Bab ini menguraikan gambaran umum lokasi penelitian yaitu gambaran umum Kabupaten Jember dan Lokalisasi Puger

BAB III Pembahasan

Bab ini akan membahas tentang rumusan masalah yang ingin dikaji yaitu dampak penutupan lokalisasi Puger Jember terhadap perekonomian masyarakat sekitar

BAB IV Kesimpulan

Adalah pokok bahasan terakhir sebagai penutup dalam studi yang berisi kesimpulan terhadap permasalahan yang terjadi. Kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah penelitian yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKALISASI PUGER

2.1 Gambaran Umum Puger

2.1.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Jember secara astronomis terletak pada posisi $6^{\circ}27'29''$ s/d $7^{\circ}14'35''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}59'6''$ s/d $8^{\circ}33'56''$ Lintang Selatan dengan luas wilayah seluas $3.293,34 \text{ Km}^2$ dan memiliki ± 76 pulau-pulau kecil dengan pulau terbesar adalah Pulau Nusa Barong. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Jember memiliki batas :

1. Sebelah Utara : Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Probolinggo
2. Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
3. Sebelah Timur : Kabupaten Banyuwangi
4. Sebelah Barat : Kabupaten Lumajang

Kota Puger merupakan Kecamatan Puger yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Jember. Kecamatan Puger mempunyai luas wilayah 149.00 Km^2 dengan ketinggian rata-rata 12 m dari atas permukaan laut. Kecamatan Puger terdiri dari 12 desa yaitu: Wringin Telu, Purwoharjo, Mojomulyo Puger Kulon, Puger Wetan, Mojosari, Grenden, Kasiyan, Mlokorejo, Wonosari, Jambearum, Bagon. Seluruh Desa berkualifikasi Desa Swadaya.

Batas wilayah kecamatan Puger adalah sebagai berikut:

Utara : Kecamatan Balung

Timur : Kecamatan Wuluhan

Barat : Kecamatan Gumuk Mas

Selatan : Samudra Hindia

Puger berjarak kira-kira 39 km arah Selatan Kota Jember. Kecamatan Puger memiliki beberapa wilayah pemerintahan desa, dimana dua diantaranya adalah Desa Puger Wetan dan Desa Puger Kulon yang merupakan wilayah dengan potensi dominan perikanan laut. Kampung Nelayan yang berada di Desa Puger Wetan berada dikawasan tepi Sungai Bedadung, sedangkan Kampung Nelayan yang berada di Desa Puger Kulon berada di kawasan tepi Sungai Besini. Kedua kampung nelayan tersebut dibatasi oleh kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Puger yang terletak di tepi muara kedua sungaitersebut menuju Samudera Indonesia.

Desa Puger Kulon ini terletak berdampingan dengan desa Puger Wetan. Desa ini juga berada kurang lebih 30 km dari pusat kota Jember kearah selatan. Luas Desa Puger Kulon sekitar 388.800m². Desa Puger Kulon areal persawahan luasnya 6,955m² dan areal ladang 21,394m². Di desa Puger kulon ini selain memiliki pesisir, juga memiliki tambak. Pada tahun 2009, Jumlah penduduk desa puger kulon, jenis kelamin laki-laki berjumlah sekitar 6842 orang, perempuan 6856 orang sedangkan jumlah kepalakeluarga sekitar 4006 KK. Jadi secara keseluruhan jumlah penduduk pada tahun 2009 sekitar 13.698 orang, sedangkan jumlah penduduk tahun yang lalu sekitar 13.250 orang (monograf desa Puger Kulon). Secara administratif batas desa Puger Kulon adalah :

- a. Sebelah Utara : Desa Grenden
- b. Sebelah Selatan : Samudera Hindia/ Samudera Indonesia
- c. Sebelah Barat : Desa Mojosari
- d. Sebelah Timur : Desa Puger Wetan

Seperti halnya dengan desa Puger Wetan, wilayah utara desa Puger Kulon ini juga merupakan areal persawahan dan ladang. Masyarakat yang berada disekitar wilayah itu penduduknya juga bekerja sebagai petani dan ada juga sebagai nelayan. Areal ladang dan persawahan selain ditanami oleh Padi, Jagung dan Kedelai juga ditanami oleh buah Semangka dan Melon. Selain itu

penduduknya juga bekerja di usaha pembakaran batu kapur. Tempat pembakaran batu kapur menjadi usaha rumah tangga penduduk desa Puger kulon. Usaha dagang ini menjadi tumpuan utama penduduk yang berada disekitar gunung kapur (gunung Sadeng).

Gunung ini berada di wilayah desa Puger Wetan, Puger Kulon dan Grenden. Saat ini tepatnya di sekitar kaki gunung kapur saat ini dibangun pabrik semen yang berencana beroperasi 2011. Sedangkan di wilayah pesisirnya dijadikan tempat wisata pantai yang diberi nama Pantai Pancer. Sebelah timur pantai ini merupakan tempat wisata gunung Watangan yang dikenal dengan Kucur. Ditempat ini terdapat pemandian yang konon menurut cerita peninggalan Jepang atau Belanda. Selain itu juga ada goa peninggalan Jepang yang berada di puncak gunung Watangan. Tempat wisata ini bisa dicapai dengan memakai perahu atau jukung menyebrangi muara sungai Bedadung dan Besini. Masjid besar Jamik Al Himah terletak di desa Puger Kulon begitu juga dengan gereja. Selain itu Bank BRI, Danamon, Puskesmas, kantor kecamatan serta kantor Polisi juga berada di wilayah desa Puger Kulon.

2.1.2 Kondisi Demografi

Secara umum penduduk Puger dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu penduduk asli dan penduduk pendatang (masyarakat migran). Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan, pengolah hasil perikanan, serta pedagang ikan. Angka pertumbuhan penduduk di Puger semakin meningkat terkait dengan tingkat natalitas, mortalitas, dan mobilitasnya. Dengan demikian, diperkirakan dalam beberapa tahun mendatang wilayah permukiman Puger akan semakin padat seiring dengan kebutuhan hunian di Puger. Masyarakat Puger hampir seluruhnya beragama Islam. Pada umumnya mereka adalah pemeluk agama Islam yang aktif, sehingga peran Pemuka Agama Islam (kaum ulama) menjadi amat menonjol. Para Kiai merupakan figur sentral yang amat dihormati dan disegani. Walaupun masyarakat Puger merupakan pemeluk agama Islam aktif, namun mereka belum sepenuhnya meninggalkan bentuk-bentuk kepercayaan lama, terutama untuk kegiatan melaut.

1) Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Jember berdasarkan hasil sensus penduduk Tahun 2010 tercatat sebanyak 2.329.929 jiwa, terdiri dari 1.143.766 jiwa penduduk laki-laki dan 1.186.163 jiwa penduduk perempuan, dengan sex ratio di Kabupaten Jember sebesar 96,43. Dari tahun ke tahun jumlah penduduk Kabupaten Jember relatif terus bertambah. Jika dibandingkan dengan Tahun 2009, penduduk Kabupaten Jember bertambah 14.227 jiwa atau sebesar 0,61 %. Jika dibandingkan dengan hasil sensus penduduk Tahun 2000, maka selama 10 (sepuluh) tahun terjadi pertambahan penduduk sebanyak 142.272 jiwa atau pertumbuhan rata-rata penduduk sebesar 0,63 % per tahun.

2) Persebaran dan Kepadatan

Distribusi penduduk Kabupaten Jember dapat dikatakan tersebar secara merata untuk masing-masing kecamatan. Jumlah penduduk Kecamatan Puger 105.986, Kepadatan penduduk rata-rata pada tahun 2010 adalah 711.36 jiwa/km².

2.1.3 Kondisi Sosial Ekonomi

Jenis Pekerjaan	2010	2011	%	2012	%	2013	%
Petani	26693	15258	(-) 42,8	14.258	(-) 6,5	14.158	(-) 0,7
Pertambangan	778	11871	(+) 93,6	13.620	(+) 14,5	13.921	(+) 2
Industri Pengolahan	3225	1228	(-) 61	1.328	(-) 8,3	1.372	(-) 3
Bangunan	155	1351	(+) 77	1.351	-	1.335	(-) 1,1
Nelayan	5663	1663	(-) 17,6	4.713	(+) 1,07	4.817	(+) 2,20

Sumber: BPS Puger 2013

Sementara kondisi ekonomi masyarakat puger Pra Sejahtera sebanyak 3.293 KK, KS I sebanyak 7.545 KK, KS I sebanyak 7.545 KK, KS II sebanyak 17.019 KK, KS III sebanyak 4.533, KS III+ sebanyak 936 KK.

2.1.4 Sosial Dan Budaya

Berdasarkan data Kantor Departemen Agama Kabupaten Jember, Kabupaten Jember Dalam Angka 2010 tercatat bahwa jumlah bangunan masjid 2.355 buah,, bangunan mushola 10.285 buah, bangunan gereja Kristen Protestan 72 buah, bangunan gereja Kristen Katholik 14 buah, bangunan pura 12 buah dan bangunan

vihara 2 buah. Banyaknya sekolah dan kelas negeri dan swasta tahun pelajaran 2010/2011 di kecamatan Puger TK 45, SD/MI 67, SMP/MTS 18, SMA/MAN 6, SMK 4. Sementara jumlah penduduk miskin di kecamatan Puger mencapai 2% atau sekitar 5.004 keluarga.

Adat istiadat sebagai kearifan lokal (*local wisdom*) yang masih berlaku pada masyarakat di Kecamatan Puger:

1. Upacara Petik Laut/Larung Sesaji

Petik Laut adalah sebuah bentuk ritual yang didasari dari kearifan lokal masyarakat. Hampir setiap kawasan berpesisir di Indonesia memiliki ritual Petik Laut dengan nama yang berbeda-beda. Tujuan Petik Laut dilakukan adalah sebagai bentuk rasa syukur dari masyarakat atas berkah ikan yang didapat selama setahun kemarin. Serta sebagai bentuk permohonan agar dijauhkan dari mara bahaya dari laut.

Awal ritual Petik Laut/Larung Sesaji adalah menghantar sesajen yang biasanya dibuat oleh sesepuh desa/tokoh desa dan dibawa ke Balai Desa untuk didoakan oleh seluruh masyarakat Desa setempat. Sesajen utama biasanya menggunakan kepala hewan entah itu kepala kambing atau kepala sapi. Kalau kambing maka harus dua ekor dengan warna bulu hitam dan satunya berbulu putih. dan untuk sapi maka cukup satu ekor. Sesajen lainnya adalah tumpeng, patung penganten, ayam putih, dan makanan-makanan lain yang umum dimakan oleh masyarakat nelayan kelas bangsawan dengan harapan agar masyarakat semuanya bisa menikmati makanan yang serupa dikemudian hari. Sesajen utama disini selalu diletakkan di dalam perahu kecil yang nantinya akan dilarung.

2. Upacara Ruwatan (Bersih Desa)

Ruwatan adalah salah satu upacara tradisional dengan tujuan utama mendapatkan keselamatan supaya orang terbebas dari segala macam kesialan hidup, nasib jelek dan selanjutnya agar dapat mencapai kehidupan yang *ayom-ayem-tentrem* (aman, bahagia, damai di hati). Lebih konkritnya ruwatan sebagai suatu upaya membersihkan diri dari sengkala dan sukerta (dosa dan sial) yang diakibatkan dari perbuatannya sendiri, hasil perbuatan jahat orang lain

maupun *force-majeur* misalnya faktor kelahiran dan ketidaksengajaan di luar kendali dirinya.

Bersih desa ini sudah tradisi yang dilaksanakan setiap tahun dengan mengambil tepat di bulan Suro. Kegiatan ini biasa disebut ruwatan desa atau 'selamatan' untuk membersihkan segala sesuatu yang sudah diperbuat selama setahun. Serangkaian acara digelar masyarakat desa di Kabupaten Jember untuk memeriahkan perayaan Suro. Diawali dengan kegiatan bedah rangka yang ditandai selamatan atau berdoa bersama. Pawai budaya yang didalamnya juga terdapat kegiatan nyekar bersama ke makam leluhur dan tokoh desa yang diyakini 'mbabat alas'. Bersih desa ini juga salah satu bentuk rasa syukur masyarakat kepada Allah SWT, atas berkah yang sudah diterima dan dirasakan selama setahun terakhir. Dan bentuk permohonan keselamatan untuk setahun ke depan.

2.2 Lokalisasi Puger

Lokalisasi pelacuran sudah lama ada di desa Puger Kulon dan baru dilegalisasi tahun 1990 berdasarkan instruksi Bupati Jember No.16/1990. berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No.14 Tahun 2001 menghasilkan Keputusan bahwa Prostitusi Puger Kulon dinyatakan sebagai Tempat Pelayanan Sosial Transisi (TPST) yaitu keadaan yang sebelumnya merupakan prostitusi murni dijadikan tempat untuk mencetak para mucikari dan PSK sebagai tenaga kerja yang layak untuk bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku agar nantinya para penghuni prostitusi di Puger Kulon menjadi pekerja yang layak baik di mata pemerintah maupun di mata agama. Kebijakan tersebut kemudian dilanjutkan dengan adanya Surat Keputusan Bupati Jember Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penanganan Lokalisasi Rehabilitasi Prostitusi Puger Kulon menjadi Tempat Pelayanan Sosial Transisi untuk Pekerja Seks Komersil di Kabupaten Jember. Surat Keputusan Bupati ini merupakan suatu bentuk perubahan dari Keputusan Bupati No.64 Tahun 2002 tentang Perubahan Status dan Penanganan Lokalisasi Rehabilitasi Prostitusi Puger Kulon menjadi Tempat Pelayanan Sosial Transisi untuk Pekerja Seks Komersil di Kabupaten Jember. Masa Tempat Pelayanan Sosial Transisi yang dilaksanakan adalah selama 3 (tiga)

tahun terhitung sejak tanggal 22 April 2002 sesuai dengan Keputusan Bupati Jember Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penanganan Rehabilitasi Prostitusi Puger Kulon menjadi Tempat Pelayanan Sosial Transisi untuk Pekerja Seks Komersial. Hal ini berarti selama periode 3 (tiga) tahun secara terus menerus dilakukan bimbingan dan motivasi, pelayanan kesehatan dan pelatihan keterampilan serta manajemen¹



¹ Muclas Adi Putra. "Kontroversi Penutupan Lokalisasi Puger Kulon di Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun 2001-2007." *Jurnal*. Universitas Jember, 2013.